Vol. 2 No. 3 (2026)
DOI: https://doi.org/10.61166/iffah.v2i3.54
ISSN: 3089-5871
pp. 197-203

AL-IFFAH
Journal of Islamic Sciences Research

Research Article

Implementasi Tata Kelola Sampah di Kawasan Wisata Pulau Gili Labak Madura Dalam Tinjauan Ḥifẓ Al-Bi'ah dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008

Muhammad Haidar Ali, Mohamad Ali Hisyam, Dery Ariswanto

Program Studi Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

Corresponding Author, E-mail; 220711100049@student.trunojoyo.ac.id (Muhammad Haidar Ali)

Copyright © 2026 by Authors, Published by **Al-Iffah: Journal of Islamic Sciences Research**. This is an open access article under the CC BY License https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Received : August 13, 2026
Revised : September 17, 2026
Accepted : October 15, 2026
Available online : November 04, 2026

How to Cite: Muhammad Haidar Ali, Mohamad Ali Hisyam, & Dery Ariswanto. (2026). Implementation of Waste Management in the Gili Labak Island Tourist Area, Madura: A Perspective Based on *Ḥifẓ al-Bi'ah* (Environmental Preservation) and Law Number 18 of 2008. *Al-Iffah: Journal of Islamic Sciences Research*, 2(3), 197–203. https://doi.org/10.61166/iffah.v2i3.54

Implementation of Waste Management in the Gili Labak Island Tourist Area, Madura: A Perspective Based on *Ḥifẓ al-Bi'ah* (Environmental Preservation) and Law Number 18 of 2008

Abstract. Waste management in the Gili Labak Island tourist area has become an issue requiring attention, as increasing tourism activities lead to a rise in waste generation, potentially threatening the sustainability of the coastal environment. This study aims to examine waste management processes and practices in the Gili Labak Island tourist area, analyzing their implementation through the lens of *ḥifẓ al-bi'ah* (environmental preservation) and Law Number 18 of 2008 concerning Waste Management. The study employs a qualitative method with a juridical-empirical approach, conducted as field research. Data were collected through observation, interviews, and documentation, involving

informants such as tourism managers, local residents, business operators, and tourists. Data analysis was performed through reduction, presentation, and conclusion drawing, while data validity was verified via source triangulation. The findings indicate that waste management efforts—including the provision of trash bins, community clean-up activities, waste collection, and transport to the mainland—are currently in place. However, implementation remains suboptimal due to limited infrastructure and facilities, a lack of waste segregation at the source, insufficient transport capacity, the absence of processing facilities (such as 3R-based waste transfer stations or recycling units), and a persistent lack of awareness among some tourists. From the perspective of *ḥifẓ al-bi'ah*, while these practices reflect the human mandate as *khalifah* (steward) to protect the environment, they do not yet fully satisfy the principles of preventing environmental degradation and fostering public well-being. Under Law Number 18 of 2008, current waste management efforts lean toward reduction and handling, yet they lack a systematic, comprehensive, and sustainable approach.

Keywords: waste management; Gili Labak Island; ḥifẓ al-bi'ah; Law Number 18 of 2008.

Abstrak. Pengelolaan sampah di kawasan wisata Pulau Gili Labak menjadi persoalan yang perlu mendapatkan perhatian seiring meningkatnya aktivitas pariwisata yang berdampak pada bertambahnya timbulan sampah dan berpotensi mengganggu kelestarian lingkungan pesisir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses dan praktik pengelolaan sampah di kawasan wisata Pulau Gili Labak serta menganalisis pelaksanaannya berdasarkan perspektif ḥifẓ al-bi'ah dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dan jenis penelitian lapangan. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri atas pengelola wisata, masyarakat setempat, pelaku usaha, dan wisatawan. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah telah dilakukan melalui penyediaan tempat sampah, kerja bakti, pengumpulan sampah, dan pengangkutan ke daratan. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena keterbatasan sarana dan prasarana, belum adanya pemilahan dari sumber, keterbatasan pengangkutan, belum tersedianya fasilitas pengolahan seperti TPS 3R atau unit daur ulang, serta masih rendahnya kesadaran sebagian wisatawan. Dalam perspektif ḥifẓ al-bi'ah, praktik tersebut telah mencerminkan amanah manusia sebagai khalifah dalam menjaga lingkungan, tetapi belum sepenuhnya memenuhi prinsip pencegahan kerusakan dan penciptaan kemaslahatan. Berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2008, pengelolaan telah mengarah pada kegiatan pengurangan dan penanganan sampah, tetapi belum sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan.

Kata Kunci : tata kelola sampah; Pulau Gili Labak; ḥifẓ al-bi'ah; UU Nomor 18 Tahun 2008.

PENDAHULUAN

Lingkungan hidup merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia yang harus dijaga kelestariannya. Dalam perspektif Islam, manusia berkedudukan sebagai khalifah di bumi sehingga memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan alam dan mencegah kerusakan. Konsep ḥifẓ albi'ah berkembang dalam kajian maqāṣid al-syarī'ah sebagai prinsip perlindungan dan pelestarian lingkungan. Prinsip tersebut menempatkan pemeliharaan lingkungan sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan dan mencegah mafsadah (Arzam & Kusnadi, 2025; Asmuni & Khusnul Khuluq, 2025).

Persoalan sampah semakin penting seiring meningkatnya penduduk, aktivitas ekonomi, dan pariwisata. Skripsi ini mencatat bahwa data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) menunjukkan masih terdapat sampah yang

belum terkelola secara optimal. Kabupaten Sumenep juga menghadapi persoalan pengelolaan sampah, khususnya pada wilayah kepulauan yang memiliki keterbatasan sarana pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan.

Pulau Gili Labak merupakan destinasi wisata bahari di Kabupaten Sumenep yang mengalami perkembangan aktivitas pariwisata. Peningkatan kunjungan wisatawan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, tetapi juga meningkatkan tekanan terhadap lingkungan pesisir. Penelitian terdahulu mengenai Gili Labak menunjukkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan wisata serta perlunya tata kelola lingkungan yang berkelanjutan (Supriono et al., 2019; Hidayat & Dzulkarnain, 2024).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 menegaskan bahwa pengelolaan sampah dilakukan melalui pengurangan dan penanganan sampah. Penanganan mencakup pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sampah tidak hanya berorientasi pada pembuangan, tetapi juga pada pengurangan timbulan sejak sumbernya.

Penelitian ini memiliki kebaruan karena mengkaji implementasi tata kelola sampah di kawasan wisata Pulau Gili Labak dengan menggabungkan perspektif ḥifẓ al-bi'ah dan UU Nomor 18 Tahun 2008. Fokus penelitian mencakup proses pengumpulan, penampungan, pengangkutan, pengolahan, serta peran pemerintah, pengelola wisata, masyarakat, pelaku usaha, dan wisatawan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) dan pendekatan yuridis empiris. Penelitian dilakukan di kawasan wisata Pulau Gili Labak, Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk melihat hubungan antara ketentuan hukum yang terdapat dalam UU Nomor 18 Tahun 2008 dengan praktik pengelolaan sampah yang berlangsung di lapangan.

Data penelitian diperoleh dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara semi-terstruktur dengan pihak yang terlibat atau mengetahui pengelolaan sampah di kawasan wisata, sedangkan data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, buku, dan penelitian terdahulu yang digunakan dalam skripsi. Informan terdiri atas pengelola wisata/Pokdarwis, masyarakat lokal, pelaku usaha, dan wisatawan. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung.

Analisis dilakukan secara kualitatif melalui tahap reduksi data, penyajian data, serta analisis dan penarikan kesimpulan. Data kemudian dibandingkan dengan prinsip ḥifẓ al-bi'ah dan ketentuan UU Nomor 18 Tahun 2008. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Pengelolaan Sampah di Kawasan Wisata Pulau Gili Labak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Pulau Gili Labak telah berjalan melalui beberapa tahapan. Pertama, pengumpulan sampah dilakukan

oleh pengelola wisata dan masyarakat melalui kegiatan pembersihan kawasan pantai, dermaga, dan area wisata. Sampah yang berserakan dikumpulkan secara manual menggunakan karung atau kantong sampah, terutama setelah akhir pekan atau ketika kunjungan wisatawan meningkat.

Kedua, tersedia tempat penampungan pada beberapa titik, tetapi jumlahnya masih terbatas dan belum seluruhnya dipisahkan berdasarkan jenis sampah organik dan nonorganik. Sampah yang masih tercampur menyebabkan proses pemanfaatan kembali dan pengolahan menjadi lebih sulit.

Ketiga, karena Pulau Gili Labak belum memiliki fasilitas pemrosesan akhir, sampah yang terkumpul diangkut menggunakan perahu menuju daratan Kabupaten Sumenep. Pengangkutan tidak dapat dilakukan setiap hari karena bergantung pada ketersediaan kapal, kondisi cuaca, dan biaya operasional. Akibatnya, sampah terkadang harus ditampung sementara di pulau.

Keempat, pengolahan sampah masih terbatas. Belum terdapat fasilitas seperti TPS 3R, bank sampah, atau unit daur ulang di Pulau Gili Labak. Sampah pada umumnya dikumpulkan dan kemudian diangkut ke daratan tanpa pemilahan atau pengolahan terlebih dahulu. Dengan demikian, prinsip Reduce, Reuse, dan Recycle (3R) belum berjalan secara optimal.

Dari sisi kelembagaan, pengelola wisata telah melakukan perencanaan sederhana melalui penyediaan tempat sampah, kegiatan kerja bakti, edukasi kepada wisatawan, serta koordinasi dengan pemerintah desa dan masyarakat. Namun, perencanaan belum dituangkan dalam program pengelolaan sampah yang komprehensif dan berkelanjutan. Pemerintah juga telah memberikan dukungan fasilitas kebersihan dan kegiatan bersih pantai, tetapi fasilitas yang tersedia masih perlu ditambah.

Pengelolaan Sampah dalam Perspektif Ḥifẓ al-Bi'ah

Ḥifẓ al-bi'ah menempatkan perlindungan lingkungan sebagai bagian dari kemaslahatan dan pencegahan kerusakan. Dalam pemikiran Yusuf al-Qaradawi, manusia sebagai khalifah memiliki amanah untuk memelihara lingkungan, menjaga keseimbangan, serta menghindari tindakan yang menimbulkan kerusakan. Karena itu, pengelolaan sampah tidak cukup hanya dilakukan setelah sampah dihasilkan, tetapi perlu diarahkan pada pencegahan dan pengurangan timbulan.

Prinsip al-istikhlāf tercermin melalui keterlibatan pengelola wisata dan masyarakat dalam kegiatan kebersihan. Kerja bakti, penyediaan tempat sampah, dan pengangkutan sampah menunjukkan adanya kesadaran bahwa lingkungan merupakan amanah yang harus dijaga. Namun, keterbatasan fasilitas dan belum adanya sistem pengelolaan terpadu menunjukkan bahwa pelaksanaan amanah tersebut belum maksimal.

Prinsip at-tawāzun wa al-iʻtidāl menuntut adanya keseimbangan antara aktivitas manusia dan kemampuan lingkungan. Peningkatan aktivitas wisata perlu diimbangi dengan pengelolaan sampah yang mampu mencegah tekanan terhadap ekosistem pesisir. Kondisi sampah yang masih tercampur, keterbatasan pengangkutan, dan belum adanya pengolahan menunjukkan bahwa keseimbangan tersebut belum sepenuhnya terwujud.

Prinsip at-tandhīf wa an-nazhāfah berkaitan dengan kebersihan lingkungan. Kegiatan pembersihan pantai, kerja bakti, penyediaan tempat sampah, dan imbauan kepada wisatawan merupakan bentuk penerapan prinsip tersebut. Namun, masih ditemukannya sampah di beberapa lokasi menunjukkan bahwa upaya kebersihan perlu disertai perubahan perilaku dan pencegahan sejak sumber.

Dengan demikian, pengelolaan sampah di Pulau Gili Labak telah mencerminkan nilai ḥifẓ albi'ah, tetapi belum sepenuhnya memenuhi prinsip daf' al-mafsadah dan jalb al-maṣlaḥah. Upaya menjaga kebersihan sudah ada, sedangkan aspek pencegahan timbulan, pemanfaatan kembali, pemilahan, dan daur ulang masih perlu diperkuat.

Pengelolaan Sampah Berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2008

Pasal 19 UU Nomor 18 Tahun 2008 membagi pengelolaan sampah menjadi pengurangan dan penanganan. Di Gili Labak, kegiatan penanganan lebih terlihat melalui pembersihan, pengumpulan, dan pengangkutan. Sementara itu, pengurangan sampah belum terlaksana secara menyeluruh.

Pasal 20 mengatur pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa imbauan menjaga kebersihan telah dilakukan, tetapi kemasan sekali pakai masih ditemukan dan belum terdapat sistem terstruktur untuk pembatasan timbulan, pemanfaatan kembali, maupun pendauran ulang.

Pasal 22 mengatur penanganan melalui pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Pengumpulan telah berjalan melalui kerja bakti dan kegiatan pembersihan. Pengangkutan juga telah dilakukan menuju daratan, tetapi terkendala kondisi geografis, ketersediaan transportasi, cuaca, dan biaya. Pemilahan dan pengolahan belum optimal karena keterbatasan fasilitas, sedangkan pemrosesan akhir masih bergantung pada fasilitas di daratan.

Berdasarkan keseluruhan temuan, praktik pengelolaan sampah di Gili Labak telah mengarah pada ketentuan UU Nomor 18 Tahun 2008, tetapi belum memenuhi tuntutan pengelolaan yang sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan. Kesenjangan terutama terlihat pada pengurangan sampah, pemilahan dari sumber, pengolahan, ketersediaan fasilitas, dan keberlanjutan sistem pengangkutan.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor pendukung meliputi keterlibatan Pokdarwis, masyarakat lokal, pelaku usaha, wisatawan, dan pemerintah; adanya kegiatan gotong royong; tersedianya beberapa tempat sampah; adanya edukasi dan imbauan; serta adanya upaya pengangkutan sampah keluar pulau.

Faktor penghambat meliputi keterbatasan jumlah dan jenis tempat sampah, belum adanya pemilahan dari sumber, belum tersedianya TPS 3R/bank sampah/unit daur ulang, keterbatasan sarana transportasi laut, ketergantungan pada cuaca dan biaya operasional, keterbatasan sumber daya manusia, serta masih rendahnya kesadaran sebagian wisatawan.

KESIMPULAN

Pengelolaan sampah di kawasan wisata Pulau Gili Labak telah dilaksanakan melalui pengumpulan sampah, penyediaan tempat penampungan, kerja bakti, pengangkutan sampah ke daratan, serta edukasi kepada wisatawan. Pelaksanaannya melibatkan Pokdarwis, masyarakat, pelaku usaha, wisatawan, dan pemerintah. Namun, sistem tersebut masih lebih berorientasi pada pembersihan, pengumpulan, dan pengangkutan daripada pengurangan dan pengolahan sampah secara terpadu.

Ditinjau dari ḥifẓ al-bi'ah, pengelolaan yang telah dilakukan mencerminkan amanah manusia sebagai khalifah, upaya menjaga kebersihan dan keseimbangan lingkungan, serta pencegahan kerusakan. Akan tetapi, penerapannya belum optimal karena pencegahan timbulan sampah, pemilahan, pemanfaatan kembali, dan daur ulang belum berjalan secara menyeluruh. Berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2008, praktik pengelolaan telah mengarah pada ketentuan pengurangan dan penanganan sampah, khususnya pengumpulan dan pengangkutan, tetapi masih terdapat kesenjangan pada pemilahan, pengolahan, pemrosesan akhir, sarana prasarana, dan keberlanjutan sistem.

Diperlukan penguatan sinergi antara pemerintah daerah, pengelola wisata, masyarakat, pelaku usaha, dan wisatawan melalui penyediaan tempat sampah terpilah, fasilitas pengolahan, sistem pengangkutan yang lebih teratur, penerapan 3R, edukasi lingkungan, serta pengawasan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdussamad, Zuchri. Metode Penelitian Kualitatif. Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.

Al Janwir, Haris, Abdul Razaq, dan Gamal Achyar. "Waste Management in Residential Areas Bordering Banda Aceh Based on the Concept of Ḥifẓ Al-Bi'ah." Jurnal Al-Mudharabah 7, no. 1 (2026): 309–314.

Ambina, Dipo Gita. "Tinjauan Pemilahan Sampah Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah." Jurnal Bina Hukum Lingkungan 3, no. 2 (2019): 183–184.

Arzam dan Kusnadi. "Maqasid al-Shari'ah and Ecotheology: A Philosophical Analysis of the Normative Foundations of Islamic Law in Ecological Issues." Jurnal Mediasas 8, no. 4 (2025): 23–25.

Asmuni, M. Khusnul Khuluq. "Hifz Al-Bi'ah as Part of Maqashid al-Shari'ah and Its Relevance in the

Context of Global Climate Change." Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies 7, no. 2 (2025): 44–48.

Hidayat, Medhy Aginta, dan Iskandar Dzulkarnain. "Pengembangan Infrastruktur Community Based Tourism (CBT) Wisata Halal Berbasis Ekowisata Bahari di Pulau Gili Labak, Madura." Jurnal Abdimas Pariwisata 5, no. 1 (2024): 42–49.

Kamali, Mohammad Hashim. Maqāṣid al-Shariah Made Simple. London: The International Institute of Islamic Thought, 2019.

Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.

Priyatno, Prima Dwi, Ahmad Hasan Ridwan, dan Nurrohman Syarif. "Circular Economy Philosophy Based on Hifz al-Bi'ah for Economic Justice." Journal of Islamic Economics and Finance Studies 6, no. 2 (2026): 480–497.

Qaradawi, Yusuf al-. Riʿāyat al-Bīʾah fī Sharīʿat al-Islām. Kairo: Dar al-Shuruq, 2001.

Rozikin, Mochammad, Lalu Hendra Prayana, dan Faisal Jamaludin Tabali. "Participatory Waste Management Governance in Small Island Tourism Destinations: A Case Study of Gili Trawangan." Journal of Governance and Social Policy 5, no. 4 (2024): 148–172.

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2020.

Supriono, Melania Desy, Irawan Ari, Sunardi, dan Melania Desy. "Local Community Participation in Marine Tourism Development: A Case Study at Gili Labak Tourism, Sumenep Regency of Indonesia." Eurasia: Economics & Business 5 (2019): 14–22.

Sujarweni, V. Wiratna. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2020.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN): Capaian Pengelolaan Sampah Indonesia Tahun 2024. Jakarta: KLHK, 2025.

Zakia. "Ecotourism in Indonesia: Local Community Involvement and the Affecting Factors." Journal of Governance and Public Policy 8, no. 2 (2021): 52–58.